

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Proyek MRT Fase II Dipastikan Molor

Terkendala Lahan

JAKARTA - Proyek pembangunan moda transportasi massal berbasis rel atau *Mass Rapid Transit* (MRT) fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan) dipastikan molor laritaran masih menunggu kepastian lahan Kampung Bandan, Jakarta Utara, sebagai depo.

PT MRT Jakarta menargetkan *groundbreaking* fase II dimulai pada akhir tahun ini dengan target penyelesaian *loan agreement* atau perjanjian pinjaman luar negeri pada Juli 2018 lalu. Tertunda perjanjian kerja sama penggunaan lahan kampung Bandan antara PT MRT dan PT KAI selaku pemilik lahan di Kampung Bandan.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, perjanjian kerja sama antara PT MRT dengan PT KAI selaku pemilik lahan Kampung Bandan yang akan digunakan untuk Depo MRT masih dalam pembahasan. Begitu juga dengan perjanjian *loan agreement* sebesar Rp25 triliun yang didapat dari Japan International Cooperation Agency (JICA).

Namun, Sigit enggan menjelaskan lebih detail sudah sampai mana pembahasan dan proses pencairan pinjaman yang ditargetkan PT MRT pada Juli Agustus itu. "Kami harap perjanjian kerja sama penggunaan lahan atau pencairan segera selesai agar pembangunan bisa dilaksanakan sesuai target akhir tahun ini," kata Sigit, kemarin.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhamad Taufik terkejut mendengar belum adanya kepastian penggunaan lahan Kampung Bandan se-

bagai depo. Menurutnya, sebelum adanya perjanjian kerja sama, penggunaan lahan itu belum pasti. Padahal proses pengajuan izana pembangunan fase II sudah dilakukan sejak tahun lalu dan disetujui DPRD DKI.

"Dalam usulan pengajuan izana fase II tahun lalu sudah dicantumkan rencana pembangunan berikut dengan tahapannya. Kok, sampai sekarang belum ada kepastian lahan. Saya berharap pinjaman tidak dicairkan sebelum adanya rencana pembangunan yang matang," katanya.

Polisi Partai Gerindra itu akan mempertanyakan masalah ini kepada PT MRT dalam proses pembahasan anggaran perubahan yang tengah dilakukan saat ini. Dia berharap agar semua bisa dipercepat. "Fase II tujuan harus dilanjutkan sebelum fase I beroperasi pada Maret 2019. Sekarang fase I sudah mencapai 95% dan sudah uji coba. Jangan sampai masyarakat yang antusias untuk transportasi terkendala pembangunan transportasi yang molor dari target, berakibat transportasi tidak terintegrasi," katanya.

Direktur PT MRT Jakarta William Syahbandar beserta jajaran tidak mau berkomunitar hingga berita ini diturunkan. Sebelumnya atau pada Maret 2018 lalu, Sekretaris Perusahaan PT MRT Hikmat il-

lah menurunkan penggunaan lahan PT KAI di Kampung Bandan akan dibahas soal subsensi dalam perjanjian kerja sama. Menurutnya, kesepakatan PT MRT dengan PT KAI baru hanya kesepakatan akan ada *memorandum of understanding* (MoU).

"Dalam waktu dekat akan dibahas substansidi MoU itu. Kerja samanya menggunakan *business to business*," kata Hikmat.

Terkait tahapan pelaksanaan, Hikmat menjelaskan, tahapan pelaksanaan MRT fase II masih menunggu konsultasi. Output dari konsultasi terima dokumen basis *engineering design* itu yang nanti digunakan untuk pengadaan kontraktor pelaksanaan konstruksi fase II. "Jadi, tahapan pelaksanaan baru akan diketahui dari output yang diketahui konsultasi," ungkapnya.

Anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Perkeretaapian, Aditya Dwilaksana menilai, rencana pembangunan MRT fase II, khususnya depo Kampung Bandan di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) belum matang. Apalagi sebenarnya DKI memiliki rencana membangun depo di kawasan Ancol. Meskipun PT KAI belum persilakan lahannya digunakan untuk depo, kerja sama *business to business* antara PT KAI dengan MRT belum ada perjanjian yang pasti.

"MRT harus kerja sama dengan perjanjian matang, baik dengan PT KAI ataupun pihak lainnya agar estimasi yang disetujui sudah sesuai dengan rencana yang matang. Jangan sampai PT KAI atau pihak lainnya minta tambahan di dalam perjalannya," katanya.

Adit meminta agar Pemprov

DKI Jakarta dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) duduk bersama membicarakan kerja sama yang saling menguntungkan. Sebab, kata dia, PT KAI sebagai BUMN yang berorientasi terhadap keuntungan tidak mungkin begitu saja menyerahkan aset tanpa adanya keuntungan. Apalagi jumlahnya bilangan kerja sama dengan pihak ketiga atau perusahaan swasta, keuntungan PT KAI jauh lebih besar ketimbang kerja sama dengan se-samapemerintah.

Selain itu, banyak pembangunan di Jakarta yang dibangun BUMN dan BUMD. Dia khawatir saat dioperasionalkan nanti, baik itu MRT dengan kereta api atau dengan LRT Jabodetabek dan moda transportasi berbasis angkutan jalan, pengelolaannya tidak terintegrasi. Akibatnya masyarakat yang tidak tahu menahu soal itu merasakan kesulitan dalam menggunakan transportasi massal.

"Masyarakat itu mau naik transportasi massal kalau saling terintegrasi. Bukan hanya fisik, rute dan jadwal operasionalnya pun harus terintegrasi," katanya.

* bimasetiyadi

Kami harap perjanjian kerja sama penggunaan lahan atau pencairan segera selesai agar pembangunan bisa dilaksanakan sesuai target akhir tahun ini.

SIGIT WIDJATMOKO
Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN IIUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Indopos Pos Kota Warta Kota

Proyek MRT Fase II Dipastikan Molor

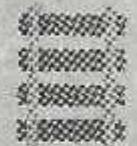
Terkendala Lahan

Proyek Mass Rapid Transit (MRT) fase II (Bundaran HI-Kampung Bandan) terkendala pengadaan lahan yang akan digunakan sebagai depo. PT MRT bersama PT KAI sebagai pemilik lahan masih terus melakukan pembahasan

MRT Koridor Selatan-Utara Tahap II (Bundaran HI-Kampung Bandan)



Beroperasi: 2020



Panjang: 6,2 Km



Stasiun: Melalui Keber Sirih, Monas, Harmoni, Glodok, dan Kota

Rencana Groundbreaking fase II dimulai akhir tahun. Termasuk loan agreement sebesar Rp25 triliun dari Japan International Cooperation Agency (JICA)

MRT Koridor Selatan-Utara Tahap I (Lebak Bulus-Bundaran HI)



Uji coba: Desember 2018
Beroperasi: Maret 2019



Panjang: 16 Km



Stasiun: 13 stasiun (7 stasiun ayang dan 6 stasiun bawah tanah)

Kapasitas angkut: 153.000 penumpang per hari.
Diharapkan 339.000 penumpang per hari pada 2020.

TRANSINDO

MRT Koridor Timur-Barat Alternatif I

- ❖ Panjang: 87 Km
- ❖ Rute: Dari Cikarang ke Tangerang berhenti di Stasiun Durian Kebo Sirih

MRT Koridor Timur-Barat Alternatif II

- ❖ Panjang: 60 Km
- ❖ Rute: Dari Bekasi ke Balaraja melalui Stasiun Blok M
- ❖ Beroperasi: 2027

Pembangunan MRT sudah lebih dari 55,33%



93,41% untuk pembangunan depo dan sekt. elevated atau ayang



97,26% untuk bawah tanah